



**POTRET EKONOMI 2016**  
(HASIL PENCAHAHAN LENGKAP SENSUS EKONOMI 2016)

# POTENSI EKONOMI KOTA DENPASAR



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA DENPASAR**

**POTRET EKONOMI 2016**  
(HASIL PENCAHAHAN LENGKAP SENSUS EKONOMI 2016)

# POTENSI EKONOMI KOTA DENPASAR



## **ANALISIS HASIL SENSUS EKONOMI TAHUN 2016**

### **KOTA DENPASAR**

---

ISBN: 978-602-6395-139

Nomor Publikasi: 51710.1714

Katalog: 9102059.5171

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: viii +43 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Infografis:

Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

Dicetak oleh:

Percetakan Arysta Jaya, Denpasar

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## KATA PENGANTAR



Untuk menunjang perencanaan pembangunan dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi di luar usaha pertanian, maka diperlukan data dan informasi mengenai usaha/perusahaan non pertanian yang tidak hanya mencakup jumlah dan pertumbuhan usaha, tetapi juga jumlah tenaga kerja per kategori lapangan dan informasi lain.

Publikasi “Potensi Ekonomi Kota Denpasar” bertujuan untuk meyajikan hasil pendataan *Listing* Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016) di Kota Denpasar sehingga dapat diperoleh gambaran dan informasi terkait potensi ekonomi kewilayahan. Informasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengevaluasi program-program terkait pengembangan potensi wilayah yang sudah dilakukan selama ini.

Hasil *listing* SE2016 yang dibahas dalam publikasi ini disajikan melalui data agregat hingga pada level kabupaten. Hal ini dilakukan karena Badan Pusat Statistik (BPS) tidak merilis data individu hasil dari kegiatan sensus ataupun survei. Analisis hasil SE2016 ditempuh melalui dua pendekatan analisis yang berbeda. Pertama adalah selain dengan melihat karakteristik usaha/perusahaan di Kota Denpasar, analisis juga dilakukan dengan membandingkan karakteristik tersebut secara proporsional dengan Provinsi Bali secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran mengenai posisi ekonomi Denpasar di Provinsi Bali. Pendekatan kedua dilakukan dengan metode LQ dan *shift-share*.

Semoga publikasi ini memberikan manfaat untuk semua pihak.

Denpasar, Desember 2017

Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Denpasar

**I Gede Suarta**

## DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	III
	Daftar Isi	IV
	Daftar Grafik	V
	Daftar Tabel	VI
<b>I</b>	Pendahuluan	1
<b>II</b>	Hasil Pendataan Kegiatan Listing Sensus Ekonomi 2016 Kota Denpasar	5
<b>II.1</b>	Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha	5
<b>II.2</b>	Karakteristik Usaha/Perusahaan Menurut Skala Usaha	7
<b>II.3</b>	Karakteristik Usaha/Perusahaan Menurut Lama Operasi	11
<b>II.4</b>	Karakteristik Perusahaan Menurut Status Usaha	15
<b>II.5</b>	Karakteristik Kepemilikan Catatan/Laporan Keuangan	17
<b>II.6</b>	Karakteristik Usaha/Perusahaan Menurut Jaringan Usaha	20
<b>II.7</b>	Pemanfaatan Internet oleh Usaha/Perusahaan	22
<b>II.8</b>	Penerapan Sistem Waralaba Oleh Usaha/Perusahaan	24
<b>II.9</b>	Penyerapan Tenaga kerja Oleh Usaha/Perusahaan	28
<b>III</b>	Analisis Potensi Ekonomi Kota Denpasar Menurut PDRB, Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja	31
<b>III.1</b>	Analisis potensi ekonomi dengan metode <i>Location Quotient</i> (LQ)	31
<b>III.2</b>	Analisis potensi ekonomi dengan metode <i>SHIFT-SHARE</i>	32
<b>III.3</b>	Hasil analisis potensi Kota Denpasar	35
<b>IV</b>	Suplemen	36
<b>IV.1</b>	Serba-serbi Sensus Ekonomi 2016	36
<b>IV.2</b>	Konsep/ Definisi yang Digunakan	36
<b>IV.3</b>	Keluaran Utama Hasil Listing SE2016	41
<b>V</b>	Daftar Pustaka	42

## DAFTAR GRAFIK

No	Nama Grafik	Halaman
II.1	Sebaran Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Hasil Listing SE2016 di Provinsi Bali	5
II.2	Persentase Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha di Denpasar Terhadap Bali Berdasarkan Hasil <i>Listing</i> SE2016	7
II.3	Proporsi Jumlah Usaha/Perusahaan Kabupaten/Kota Menurut Skala Usaha Hasil <i>Listing</i> SE2016	9
II.4	Proporsi Jumlah Usaha/Perusahaan Kabupaten/Kota Menurut Lama Operasi Hasil <i>Listing</i> SE2016	12
II.5	Pertumbuhan Jumlah Usaha/Perusahaan Kabupaten/Kota Menurut Lama Operasi Hasil <i>Listing</i> SE2016	12
II.6	Persentase Usaha/Perusahaan di Kabupaten/Kota Hasil Listing SE2016 Menurut Status Badan Usaha	15
II.7	Persentase Usaha/Perusahaan di Kabupaten/Kota yang Memiliki Badan Usaha Hasil Listing SE2016	16
II.8	Persentase Jaringan Usaha Bukan Tunggal Terhadap Total Usaha/Perusahaan di Kabupaten/Kota Menurut Hasil Listing SE2016	22
II.9	Persentase Usaha/Perusahaan Berdasarkan Pemanfaatan Internet di Kabupaten/Kota Menurut Hasil Listing SE2016	23
II.10	Persentase Usaha/Perusahaan dengan Sistem Waralaba di Kabupaten/Kota Menurut Hasil Listing SE2016	25
II.11	Banyaknya Usaha/Perusahaan yang Menerapkan Sistem Waralaba menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan STPW di Provinsi Bali	27
II.12	Sebaran Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Hasil Listing SE2016	29
II.13	Proporsi Penggunaan Tenaga Kerja pada Usaha/Perusahaan di Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016	30

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
II.1	Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016 di Kota Denpasar	6
II.2	Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha dan Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar	10
II.3	Sebaran Usaha/Perusahaan Menurut Skala Usaha ,Omzet dan Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar	11
II.4	Banyaknya Usaha/Perusahaan Berdasarkan Lama Beroperasi Menurut Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar	13
II.5	Banyaknya Usaha/Perusahaan Berdasarkan Lama Beroperasi Menurut Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016 di Kota Denpasar	14
II.6	Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Status Badan Usaha dan Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar	17
II.7	Banyaknya Usaha/Perusahaan dengan Ijin Khusus atau Tidak Berbadan Usaha dan Kepemilikan Laporan/Catatan Keuangan Menurut Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar	18
II.8	Banyaknya Usaha/Perusahaan dengan Ijin Khusus atau Tidak Berbadan Usaha dan Kepemilikan Laporan/Catatan Keuangan Menurut Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar	19
II.9	Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Jaringan Usaha di Kota Denpasar	21
II.10	Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Pemanfaatan Media Internet dan Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar	23
II.11	Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Pemanfaatan Media Internet dan Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016 di Kota Denpasar	24
II.12	Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Penerapan Sistem Waralaba dan Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016 di Kota	26

<b>II.13</b>	Banyaknya Usaha/Perusahaan yang Menerapkan Sistem Waralaba dan Kepemilikan STPW menurut Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016 di Kota Denpasar	<b>27</b>
<b>II.14</b>	Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Penerapan Sistem Waralaba dan Konsep Pengelompokan Omzet di Kota Denpasar	<b>28</b>
<b>II.15</b>	Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016 di Kota Denpasar	<b>29</b>
<b>III.1</b>	Perhitungan LQ jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja Kota Denpasar	<b>32</b>
<b>III.2</b>	Perhitungan Shift-share	<b>34</b>
<b>III.3</b>	Perhitungan dengan LQ dan Shift-share	<b>35</b>



POTRET EKONOMI 2016  
(HASIL PENGACAHAN LENGKAP SENSUS EKONOMI 2016)

# POTENSI EKONOMI KOTA DENPASAR

<https://denpasarkota.bps.go.id>

## BAB I

## PENDAHULUAN

Sensus Ekonomi (SE) merupakan kegiatan sensus yang rutin dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik setiap sepuluh tahun sekali. Selain SE, BPS juga menyelenggarakan kegiatan Sensus lain yaitu Sensus Penduduk (SP) dan Sensus Pertanian (ST). SP dan ST dilaksanakan pada tahun yang berakhiran "0" dan "3" sedangkan SE dilaksanakan pada tahun yang berakhiran "6".

Dibandingkan dengan dua sensus lainnya, sensus ekonomi merupakan sensus yang usianya paling muda. Bandingkan dengan sensus penduduk yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1961<sup>1</sup> dan sensus pertanian pada tahun 1963, sensus ekonomi baru pertama kali dilakukan pada tahun 1986. Sensus Ekonomi Tahun 2016 atau yang sering disingkat dengan SE2016 merupakan sensus ekonomi yang keempat yang dilaksanakan oleh BPS.

Tantangan pada pelaksanaan Sensus Ekonomi lebih mengarah pada ketakutan responden dalam memberikan jawaban/keterangan mengenai usaha yang mereka lakukan karena dianggap berhubungan dengan pajak. Selain itu, selama pelaksanaannya, Sensus Ekonomi mengalami beberapa kali perubahan secara metodologi baik itu dari keterangan dan informasi yang dikumpulkan maupun dari cakupan lapangan usaha yang didata. Perubahan ini didasarkan tidak hanya karena kebutuhan data akan tetapi juga karena perubahan pada standar klasifikasi lapangan usaha yang digunakan. Adapun perubahan metodologi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi antara lain adalah :

#### 1. Sensus Ekonomi Tahun 1986:

Sensus Ekonomi pertama yang diselenggarakan oleh BPS, mencakup seluruh perusahaan/usaha di sektor non pertanian baik yang menggunakan tempat tetap maupun tidak tetap dan berada dalam wilayah geografis negara kesatuan Republik Indonesia. Data dan keterangan yang dikumpulkan antara lain adalah : 1) Identitas Perusahaan; 2) Status badan hukum; 3) Sektor kegiatan perusahaan/usaha; 4) Jumlah

<sup>1</sup> Setelah merdeka Sensus Penduduk dilaksanakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Apabila menilik pada masa sebelum kemerdekaan, pemerintah Hindia Belanda pernah melaksanakan sensus pada tahun 1920 dan 1930

tenaga kerja; 5) Nilai produksi/omset; 6) Tahun mulai beroperasi secara komersial; 7) Status perusahaan; 8) Kegiatan utama dan jenis barang/jasa yang diproduksi/dijual. Sementara itu, cakupan sektor ekonomi yang didata antara lain adalah : 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Industri pengolahan; 3) Listrik, gas dan air minum; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan, rumah makan/restoran, dan jasa akomodasi; 6) Angkutan, pergudangan, dan komunikasi; 7) Lainnya.

## **2. Sensus Ekonomi Tahun 1996 :**

Kegiatan pendataan pada sensus yang kedua ini mengumpulkan informasi mengenai 1) Id Perusahaan; 2) Sektor kegiatan perusahaan/usaha; 3) Jumlah tenaga kerja; 4) Nilai produksi/omset; 5) Tahun mulai beroperasi secara komersial; 6) Status perusahaan; 7) Kelompok/grup perusahaan (konglomerasi perusahaan); 8) Kegiatan utama dan jenis barang/jasa yang diproduksi/dijual. Dilihat dari cakupan sektornya, kegiatan Sensus Ekonomi di tahun ini mencakup pada sektor-sektor yang meliputi : 1) Pertambangan dan penggalian; 2) Industri pengolahan; 3) Listrik, gas dan air minum; 4) Konstruksi; 5) Perdagangan, rumah makan/restoran, dan jasa akomodasi; 6) Angkutan, Pergudangan, dan komunikasi; 7) Lainnya.

## **3. Sensus Ekonomi Tahun 2006 :**

Pada pelaksanaan yang ketiga kalinya pendataan Sensus Ekonomi memperluas kategori cakupannya yang meliputi : C) Pertambangan dan penggalian; D) Industri pengolahan; E) Listrik, gas dan air; F) Konstruksi; G) Perdagangan besar dan eceran; H) Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; I) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi; J) Perantara keuangan; K) Real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan; M) Jasa pendidikan; N) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial; O) Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya (kecuali untuk: organisasi buruh, organisasi keagamaan, dan organisasi politik tidak dicakup dalam pelaksanaan sensus ini); dan P) Jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Keterangan atau informasi usaha/perusahaan yang dikumpulkan antara lain adalah :1) Id perusahaan; 2) Lapangan usaha dan kegiatan utama perusahaan/usaha; 3) Tahun mulai beroperasi secara komersial; 4) Waktu beroperasi perusahaan/usaha; 5) Jumlah

tenaga kerja menurut jenis kelamin; 6) Jaringan perusahaan/usaha; 7) Nilai aset perusahaan/usaha; 8) Nilai produksi/omset/pendapatan; 9) Banyaknya bulan kerja; 10) Rata-rata hari kerja sebulan; 11) Rata-rata jam kerja perusahaan/usaha dalam sehari.

#### 4. Sensus Ekonomi Tahun 2016 :

Pada Sensus Ekonomi yang terakhir ini BPS tidak hanya mengumpulkan berbagai keterangan/informasi yang secara umum telah dilakukan pada sensus sebelumnya namun juga menangkap usaha-usaha yang melakukan penjualan dengan media internet (*online*). Hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk menangkap seberapa besar peran internet dalam mempermudah mediasi antara penyedia dengan konsumen dan seberapa banyak yang telah memanfaatkannya, baik hanya untuk promosi maupun juga untuk transaksi. Tidak hanya sampai disitu, pada sensus ini juga ingin dilihat mengenai jaringan usaha yang terbentuk pada usaha/perusahaan serta penerapan sistem waralaba yang dilakukan oleh suatu usaha/perusahaan. Informasi yang dikumpulkan antara lain adalah : 1) Identitas perusahaan; 2) Kegiatan utama usaha/perusahaan; 3) Jaringan usaha/perusahaan; 4) Ketenagakerjaan; 5) Bulan kerja; 6) Pengeluaran usaha; 7) Penggunaan internet; 8) Sistem waralaba; 9) Nilai produksi/penjualan/pendapatan usaha; 10) Biaya/pengeluaran usaha; 11) Kendala dan prospek usaha. Sementara itu dari sisi cakupan lapangan usaha, pendataan di SE2016 mendata kategori lapangan usaha yang meliputi : B) Pertambangan dan Penggalian; C) Industri Pengolahan; D) Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas, dan Udara Dingin; E) Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Kegiatan Remediasi; F) Konstruksi; G) Perdagangan Besardan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda Motor; H) Pengangkutan dan Pergudangan; I) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum; J) Informasi dan Komunikasi; K) Aktivitas Keuangan dan Asuransi; L) Real Estat; M) Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis; N) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya; P) Pendidikan; Q) Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial; kecuali golongan pokok 87 (kegiatan sosial di dalam panti) dan golongan pokok 88 (kegiatan sosial di luar panti); R) Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi,

kecuali golongan pokok 92 (Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan); S) Aktivitas Jasa Lainnya, kecuali layanan kencana di dalam kelompok 96999; dan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi politik dalam golongan 9412, 942, dan 949; U) Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kecuali Kedutaan Besar dan Konsulat.

Di sisi lain, perlu diketahui bahwa meskipun dalam pelaksanaannya BPS mengumpulkan keterangan mengenai identitas responden, akan tetapi BPS tidak mempublikasikan data mikro hasil pencacahan tersebut. Identitas responden atau usaha/perusahaan yang meliputi nama dan alamat dikumpulkan untuk memastikan bahwa semua unit usaha telah dicacah dengan baik dan benar tanpa ada yang tertinggal. Data yang nantinya akan dipublikasikan adalah data agregat dan bukan merupakan data individu.

Data yang dikumpulkan dari hasil SE2016 ini secara umum bertujuan untuk :

1. Menyajikan data dasar unit usaha/perusahaan dan aktivitas usaha di luar usaha pertanian sampai wilayah administrasi yang terkecil (small area statistics).
2. Menyusun peta dan direktori perusahaan Usaha Menengah Besar (UMB) yang lengkap dan terpadu untuk setiap wilayah Kabupaten/Kota.
3. Memperoleh populasi UMB dan Usaha Mikro Kecil (UMK) menurut wilayah maupun lapangan usaha.
4. Menyusun kerangka sampel (sampling frame) survei bidang ekonomi, kecuali wilayah kabupaten daerah perdesaan.

## BAB II

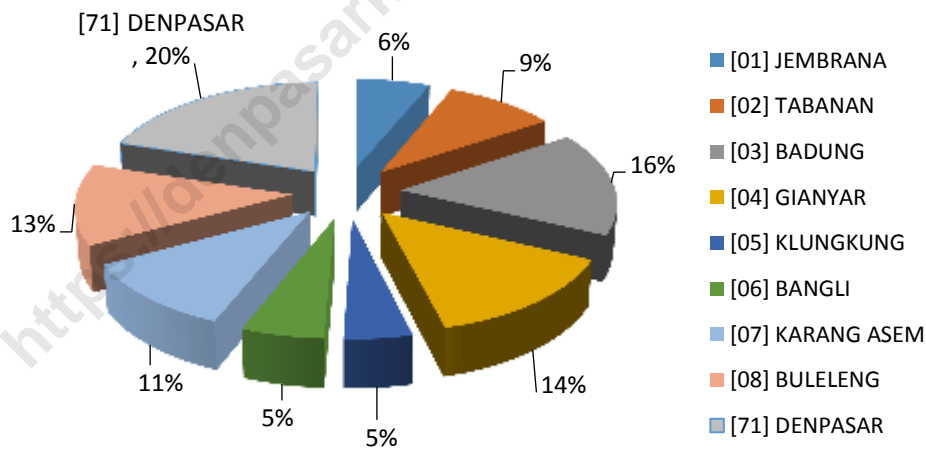
## HASIL PENDATAAN KEGIATAN LISTING SENSUS EKONOMI 2016 KOTA DENPASAR

### II.1 Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha

Sensus Ekonomi tahun 2016 (SE2016) mencatat jumlah usaha/perusahaan di Denpasar sebanyak 97.526 usaha atau setara dengan 20 persen dari keseluruhan 482.484 usaha di Bali.

Grafik II.1

#### Sebaran Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Hasil Listing SE2016 di Provinsi Bali



Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Menurut hasil listing SE(2016) ini, dapat dilihat bahwa jumlah usaha/perusahaan yang tercatat di Denpasar merupakan yang terbesar diantara wilayah lainnya.

Tabel II.1

**Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016 di Kota Denpasar**

Lapangan Usaha	Jumlah Usaha/Perusahaan	Persentase
(1)	(2)	(3)
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	370	0.38
C. Industri Pengolahan	14,469	14.84
F. Konstruksi	1,023	1.05
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	38,918	39.91
H. Pengangkutan dan pergudangan	1,625	1.67
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	23,935	24.54
J. Informasi Dan Komunikasi	1,543	1.58
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	1,314	1.35
L. Real Estat	1,716	1.76
M,N. Jasa Perusahaan	2,370	2.43
P. Pendidikan	1,389	1.42
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1,022	1.05
R,S,U. Jasa Lainnya	7,832	8.03
	97,526	100

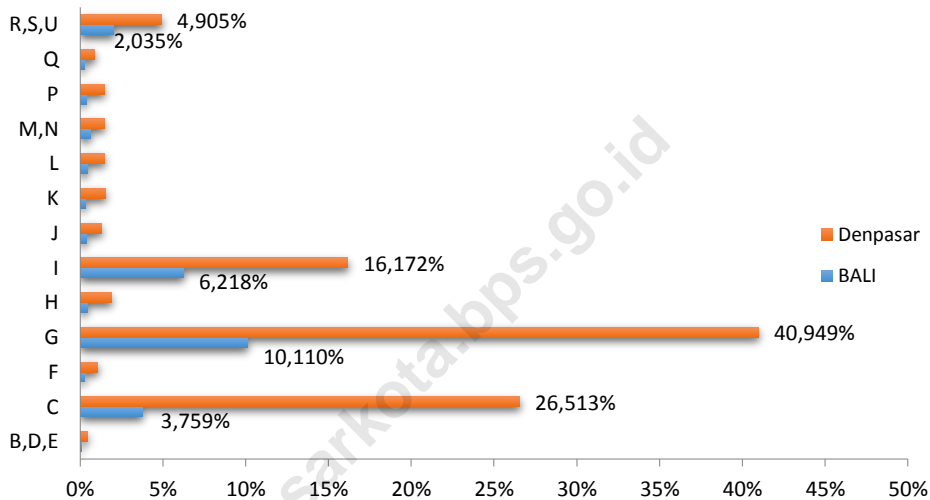
Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Sementara itu dilihat dari sebaran menurut lapangan usahanya, usaha/perusahaan yang tercatat di Denpasar sebagian besar bergerak pada tiga kategori utama yaitu (kategori G) perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan jumlah 38.918 usaha/perusahaan (39,91%), (kategori I) penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan 23.935 usaha/perusahaan (24,54%) serta (kategori c) industri pengolahan sebanyak 14.469 usaha/perusahaan (14,84%). Sedangkan pada kategori

lainnya berkisar antara 1,05% hingga 2,43% kecuali untuk kategori B,D,E yaitu Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah berjumlah 370 usaha/perusahaan atau setara 0,38%.

Grafik II.2

### Persentase Jumlah Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha di Denpasar Terhadap Provinsi Bali Berdasarkan Hasil *Listing* SE2016



Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Dibandingkan dengan keseluruhan sebaran jumlah usaha/perusahaan di Bali, kategori G (Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor) di Denpasar adalah 10,11%. Persentase sebaran jumlah usaha/perusahaan di Denpasar hampir sebagian besar tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali kecuali untuk kategori C (urutan ke-3 setelah Karangasem dan Gianyar), K (urutan ke-3 setelah Badung dan Gianyar) dan L (urutan ke-3 setelah Badung dan Gianyar).

## II.2 Karakteristik Usaha/Perusahaan Menurut Skala Usaha

Hasil SE2016 mengklasifikasikan usaha/perusahaan menjadi empat golongan yaitu : mikro, kecil, menengah dan besar. Keempat kelompok ini dibedakan dengan berbagai kriteria yang disesuaikan menurut lapangannya sehingga tidak hanya terpaku pada klasifikasi umum yang menggunakan jumlah tenaga kerja, aset maupun omzet untuk



membagi perusahaan secara keseluruhan. Hasil pengklasifikasian ini kiranya menjadi elemen substansial dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan BPS selanjutnya seperti halnya Survei Tahunan Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang dan Survei Industri Mikro dan Kecil. Kegiatan berskala besar lain di BPS yang menggunakan hasil pengklasifikasian ini adalah SE2016 Lanjutan Pendataan UMK dan UMB.

Secara umum, pengkategorian skala usaha dalam SE2016 dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

### **1. Kriteria Umum**

- a. Berdasarkan Badan Hukum: seluruh usaha yang berbadan hukum mayoritas dikategorikan sebagai Usaha Menengah dan Besar (UMB) kecuali Kategori Industri yang mempertimbangkan jumlah tenaga kerja.
- b. Penentuan skala usaha berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
- c. Usaha/perusahaan yang diklasifikasikan sebagai usaha menengah apabila memiliki kekayaan bersih > 500 juta s/d 10 miliar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau memiliki omset/tahun > 2,5 miliar s/d 50 miliar rupiah.

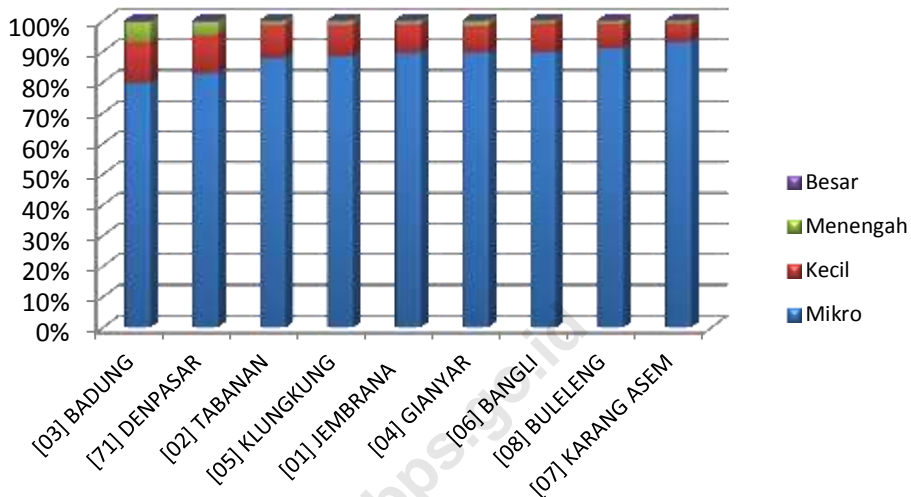
### **2. Kriteria Khusus**

- a. Untuk kelompok Industri Pengolahan, sebuah usaha/perusahaan akan dikategorikan ke dalam skala menengah apabila jumlah tenaganya 20-99 orang;
- b. Untuk konstruksi, yang dikategorikan masuk ke dalam skala menengah apabila memiliki kualifikasi M1 dan M2 sementara usaha besar apabila memiliki kualifikasi B1 dan B2;
- c. Untuk penyediaan akomodasi, semua hotel bintang dikategorikan ke dalam Usaha Menengah Besar.

Dilihat dari skala usahanya, 82,95 persen perusahaan usaha/perusahaan di Denpasar merupakan usaha mikro, 12,42 persen merupakan usaha kecil, 4,38 persen merupakan usaha menengah dan 0,26 persen sisanya termasuk usaha besar. Kesemua kabupaten/kota didominasi oleh usaha/perusahaan skala usaha mikro dan kecil.

Grafik II.3

Proporsi Jumlah Usaha/Perusahaan Kabupaten/Kota Menurut Skala Usaha Hasil Listing SE2016



Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Secara garis besar, bauran usaha/perusahaan di Denpasar lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Persentase usaha/perusahaan mikro yang lebih dari 82%, kecil 12,42% dan menengah 4,38% ini kesemuanya di dominasi kelompok "G" (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) dan kelompok "I" (Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum. Begitu halnya dengan Usaha berskala besar, persentase terbanyak masih didominasi oleh usaha/perusahaan di kategori G sebanyak 103 usaha/perusahaan. Selain itu, usaha/perusahaan skala besar juga banyak tercatat bergerak di bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi (kategori K sebanyak 42 usaha/perusahaan) dan Industri Pengolahan (kategori C sebanyak 34 usaha/perusahaan). Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2

**Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Lapangan Usaha dan Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar**

Lapangan Usaha	Skala Usaha				Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	293	42	30	5	370
C. Industri Pengolahan	12.802	1.404	229	34	14.469
F. Konstruksi	624	190	197	12	1023
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	30.950	6.372	1.493	103	38.918
H. Pengangkutan dan pergudangan	1.090	69	460	6	1.625
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	21.350	2.309	264	12	23.935
J. Informasi Dan Komunikasi	1.235	168	134	6	1.543
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	358	290	624	42	1.314
L. Real Estat	1.608	65	42	1	1.716
M,N. Jasa Perusahaan	1.575	345	444	6	2.370
P. Pendidikan	917	335	128	9	1.389
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	849	129	35	9	1.022
R,S,U. Jasa Lainnya	7.244	396	188	4	7.832
	80.895	12.114	4.268	249	97.526

Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Dilihat dari skala usahanya, 932 usaha mikro di Denpasar memiliki omzet sampai 2,5 milyar Rupiah per tahunnya, bahkan tercatat 30 perusahaan memiliki nilai omzet yang berkisar antara 2,5 milyar Rupiah hingga 50 milyar Rupiah per tahunnya. Untuk usaha berskala kecil omzet sebagian besar usaha/perusahaan di kelompok ini tercatat antara 300 juta Rupiah hingga 2,5 milyar Rupiah dan sebagian kecil yang memiliki omzet antara 2,5 milyar Rupiah hingga 50 milyar Rupiah per tahunnya yaitu sebanyak 11284 usaha/perusahaan. Di lain pihak tercatat omzet di kelompok skala menengah merata baik beromzet hingga 300 juta, interval 300 hingga 2,5 milyar maupun interval 2,5 milyar hingga 50 milyar. Untuk klasifikasi sebaran omzet menurut skala usaha tercatat 4 usaha berskala besar memiliki omzet yang setara dengan usaha skala sedang yakni pada interval 300 juta hingga 2,5 milyar. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.3.

Tabel II.3

**Sebaran Usaha/Perusahaan Menurut Skala Usaha ,Omzet dan Konsep  
Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar**

Omzet Usaha	Skala Usaha				Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Omzet ≤ 300 Juta	79.933	735	1.073	0	81.741
300 Juta < Omzet ≤ 2,5 Milyar	932	11.284	1.282	4	13.502
2,5 Milyar < Omzet ≤ 50 Milyar	30	89	1.906	33	2.058
> 50 Milyar	0	6	7	212	225
Jumlah	80.895	12.114	4.268	249	97.526

Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

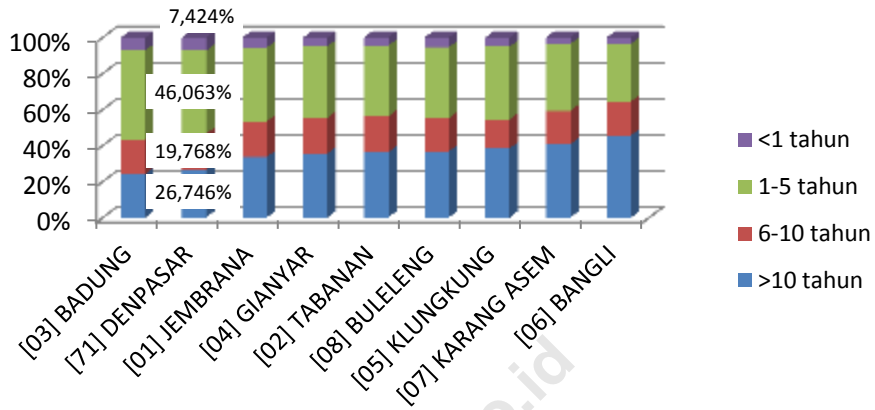
### II.3 Karakteristik Usaha/Perusahaan Menurut Lama Operasi

Analisis mengenai lama beroperasi suatu usaha/perusahaan tidak hanya bertujuan untuk melihat tren kenaikan jumlah pelaku ekonomi di suatu wilayah melainkan juga dapat ditujukan untuk melihat daya tahan dan keberlangsungan usaha/perusahaan di tengah adaptasi terhadap kondisi ekonomi wilayah tersebut. Analisis ini juga mampu melihat stagnansi pertumbuhan usaha/perusahaan di suatu wilayah. Semakin sedikit usaha/perusahaan yang bertahan cukup lama kiranya menunjukkan kondisi *demand* masyarakat yang secara umum rendah, kuatnya kompetisi serta dinamika permintaan masyarakat.

Lebih lanjut lama operasi juga dihubungkan dengan akumulasi kapital dan aset yang terbentuk dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang bertahan lebih lama seringkali dikaitkan dengan jumlah kapital dan aset yang lebih tinggi. Akumulasi ini sering berpengaruh terhadap melambat atau menurunnya rasio keuntungan terhadap total aset yang dikenal dengan *Return on Asset*.

Grafik II.4

Proporsi Jumlah Usaha/Perusahaan Kabupaten/Kota Menurut Lama Operasi Hasil Listing SE2016

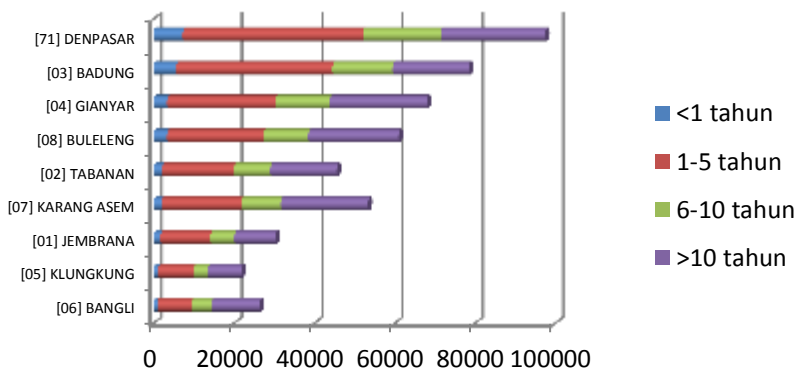


Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Di Denpasar, jumlah usaha/perusahaan yang sedang bertumbuh di rentang waktu 1 hingga 5 tahun tercatat mendominasi proporsi menurut lama operasi usaha yaitu 46 persen. Sedangkan usaha yang bertahan lebih dari 10 tahun hanya 26 persen dari keseluruhan usaha. Hal ini dapat berarti bahwa pertumbuhan usaha/perusahaan dalam 10 tahun terakhir mencapai lebih dari 4 kali lipat dan akan terus bertumbuh, melihat persentase usaha yang baru mulai berdiri mencapai persentase 7,42.

Grafik II.5

Pertumbuhan Jumlah Usaha/Perusahaan Kabupaten/Kota Menurut Lama Operasi Hasil Listing SE2016



Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Pertumbuhan usaha di Denpasar merupakan yang paling bertumbuh dibandingkan wilayah lain di Bali. Sebagian besar adalah usaha mikro dan kecil. Pertumbuhan terbesar berada di rentang tahun 2011 hingga 2015.

Melihat dari skala usaha dan lama beroperasi, skala mikro banyak yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun. Meskipun skala usahanya tidak besar namun lama beroperasi yang telah lebih dari 10 tahun ini menunjukkan bahwa usaha tersebut telah memiliki posisi yang kuat.

Meskipun demikian, untuk skala mikro lebih didominasi dengan usaha/perusahaan yang sedang bertumbuh dalam rentang waktu 1 hingga 5 tahun.

Usaha/perusahaan dengan skala besar sebagian besar telah beroperasi lebih dari 10 tahun yaitu 148 usaha/perusahaan. Pada Tabel .4 disajikan secara lengkap mengenai jumlah usaha/perusahaan berdasarkan lama beroperasinya.

Tabel II.4

**Banyaknya Usaha/Perusahaan Berdasarkan Lama Beroperasi Menurut Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar**

Skala Usaha	Skala Usaha				Jumlah
	< 1 tahun	1-5 tahun	6-10 tahun	> 10 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mikro	6.946	38.170	15.380	20.399	80.895
Kecil	154	5.097	2.857	4.006	12.114
Menengah	137	1.602	998	1.531	4.268
Besar	3	54	44	148	249
	7.240	44.923	19.279	26.084	97.526

Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Dilihat dari lapangan usahanya, kategori yang mengalami penambahan secara konsisten dan dalam jumlah terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda motor (G) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minum (I). Dihitung dari yang masih bertahan hingga pencacahan SE2016, jumlah usaha/perusahaan pada lapangan usaha ini meningkat pesat di rentang tahun 2011 hingga 2015.

Tabel II.5

Banyaknya Usaha/Perusahaan Berdasarkan Lama Beroperasi Menurut Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016 di Kota Denpasar

Lapangan Usaha	Skala Usaha				Jumlah
	< 1 tahun	1-5 tahun	6-10 tahun	> 10 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	17	165	98	90	370
C. Industri Pengolahan	754	6.568	3.092	4.055	14.469
F. Konstruksi	34	321	299	369	1.023
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	2.939	17.662	7.672	10.645	38.918
H. Pengangkutan dan pergudangan	90	663	298	574	1.625
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	2.150	11.004	4.436	6.345	23.935
J. Informasi Dan Komunikasi	175	865	340	163	1.543
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	59	490	339	426	1.314
L. Real Estat	74	819	372	451	1.716
M,N. Jasa Perusahaan	148	1.072	506	644	2.370
P. Pendidikan	40	455	279	615	1.389
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	58	457	186	321	1.022
R,S,U. Jasa Lainnya	702	4.382	1.362	1.386	7.832
	7.240	44.923	19.279	26.084	97.526

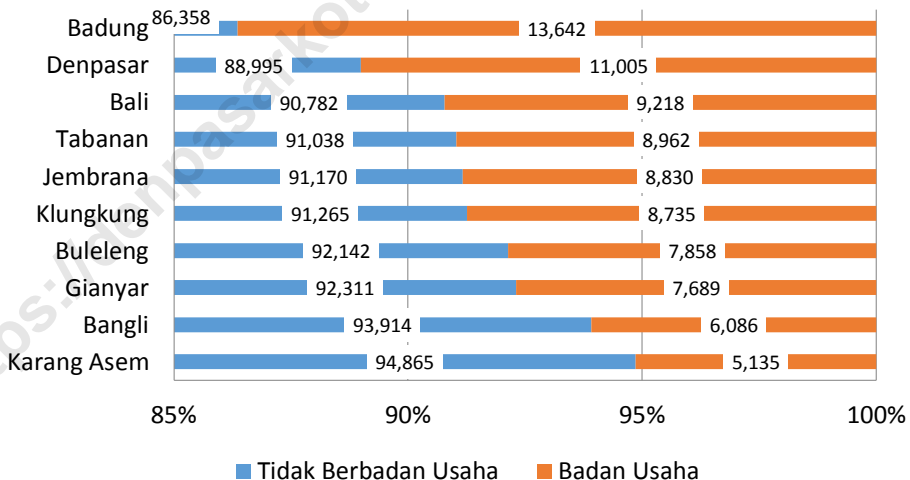
Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

#### II.4 Karakteristik Usaha/Perusahaan Menurut Status Usaha

Karakteristik perusahaan hasil SE2016 juga bisa dilihat dari status badan usaha di wilayah tersebut. Hasil pendataan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Bali belum memiliki badan usaha termasuk Denpasar. Di Denpasar hanya 11,01% usaha/perusahaan yang berbadan hukum dari keseluruhan 97526 usaha/perusahaan sedangkan 88,99% sisanya belum berbadan hukum. Persentase ini tidak terlepas dari proporsi kelompok usaha/perusahaan skala mikro dan kecil yang mendominasi sebagian besar ekonomi non pertanian di Bali. Selain itu status badan usaha juga dapat dikaitkan dengan potensi penerimaan daerah. Korelasinya positif atau dengan kata lain semakin tinggi jumlah yang memiliki badan usaha potensi penerimaan daerah kiranya akan semakin besar.

Grafik II.6

#### Persentase Usaha/Perusahaan di Kabupaten/Kota Hasil Listing SE2016 Menurut Status Badan Usaha



Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Meksipun dari sisi persentase proporsi usaha/perusahaan yang memiliki badan usaha Denpasar bukan yang terbesar, namun dari segi jumlah usaha/perusahaan di Denpasar tercatat 10733 usaha/perusahaan yang berbadan hukum. Angka ini hampir sama dengan Kabupaten Badung yang juga mencatat 10709 usaha/perusahaan yang memiliki

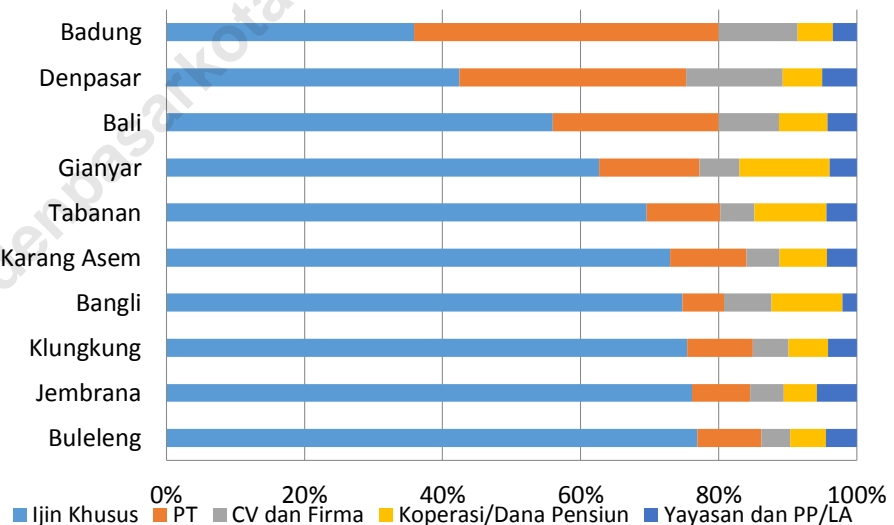


badan hukum. Dari 10733 usaha/perusahaan tersebut sebagian besar usaha di Denpasar merupakan usaha yang didirikan dengan ijin khusus. Ijin khusus ini seperti yang diketahui biasanya diberikan oleh pemerintah dengan tujuan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Usaha/perusahaan dengan ijin khusus ini mencapai 42,44% dari keseluruhan usaha/perusahaan yang berbadan hukum atau setara dengan 4555 usaha. Tercatat pula 17 diantaranya adalah usaha/perusahaan berskala besar.

Persentase usaha/badan usaha dalam bentuk CV dan Firma tercatat paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Persentasenya 13,97 dari keseluruhan 10733 usaha/perusahaan. Secara rinci komposisi persentase Denpasar lainnya adalah PT/Persero/Perum 32,85%, Koprasi/Dana pensiun 5,71%, Yayasan 4,71% dan Perwakilan perusahaan/lembaga asing merupakan yang terendah yaitu 0,31%

Grafik II.7

Persentase Usaha/Perusahaan di Kabupaten/Kota yang Memiliki Badan Usaha Hasil Listing SE2016



Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Sebagian besar usaha/perusahaan yang tidak memiliki badan usaha tercatat dalam kelompok usaha mikro dan kecil begitu juga halnya dengan usaha yang pengoperasiannya dilandasi oleh ijin khusus. Meskipun terdapat 14 usaha/perusahaan skala besar yang tidak

berbadan hukum. Di sisi lain perwakilan perusahaan/lembaga asing tercatat dalam skala mikro karena memang tidak memiliki aktivitas ekonomi. Aktivitas pada lembaga-lembaga ini hanya sebatas administrasi perkantoran seperti halnya layanan pelanggan. Sementara itu apabila melihat skala pada koperasi atau dana pensiun yang sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil kiranya dapat dilihat bahwa terdapat sebagian usaha/perusahaan di aktivitas Keuangan dan Asuransi (K) yang nilai omzetnya relatif tidak terlalu besar.

Tabel II.6

**Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Status Badan Usaha dan Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar**

Status Badan Usaha	Skala Usaha				Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	
PT/PT Persero/ Perum	26	104	3208	188	3526
CV	456	792	180	17	1445
Firma	26	22	7	0	55
Koperasi/Dana Pensiun	281	256	72	4	613
Yayasan	279	156	63	8	506
Ijin Khusus	2,803	1,460	275	17	4555
Perwakilan perusahaan/ lembaga asing	16	9	7	1	33
Tidak berbadan usaha	77,008	9,315	456	14	86793
	80,895	12,114	4,268	249	97526

Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

## II.5 Karakteristik Kepemilikan Catatan/Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Pada usaha/perusahaan yang berskala besar atau sudah memiliki manajemen sendiri laporan keuangan dapat berfungsi menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga bertujuan untuk atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Sementara itu pada usaha/perusahaan berskala mikro dan kecil terutama yang dikelola oleh rumah tangga, laporan keuangan berfungsi membedakan antara pengeluaran rumah tangga dengan pengeluaran untuk usaha.

**Tabel II.7**

**Banyaknya Usaha/Perusahaan dengan Ijin Khusus atau Tidak Berbadan Usaha dan Kepemilikan Laporan/Catatan Keuangan Menurut Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar**

Skala Usaha	Laporan/Catatan Keuangan		Jumlah
	Memiliki	Tidak Memiliki	
(1)	(2)	(3)	(4)
Mikro	4.684	75.127	79.811
Kecil	2.178	8.597	10.775
Menengah	350	381	731
Besar	25	6	31
	7.237	84.111	91.348

\* Hanya usaha/perusahaan dengan ijin khusus atau tanpa badan usaha

Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Dari 91.348 usaha/perusahaan dengan ijin khusus dan tidak memiliki badan usaha di Denpasar yang terdata dalam listing SE2016 tercatat 7.237 perusahaan yang memiliki laporan keuangan sementara 84.111 lainnya tidak memiliki laporan keuangan. Di sisi lain jumlah usaha/perusahaan di kelompok skala usaha menengah yang tercatat memiliki laporan keuangan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak memiliki laporan keuangan. Untuk kelompok usaha mikro, hanya 5,85% dari keseluruhan usaha mikro yang memiliki laporan keuangan.

Untuk usaha skala besar, perbandingan antara usaha/perusahaan yang memiliki laporan keuangan dan yang tidak memiliki adalah 4:1. Rasio ini paling tinggi diantara skala usaha lainnya.

Begitu juga apabila dilihat dari omzet usaha/perusahaan. Sebagian besar usaha/perusahaan dengan omzet dibawah 300 juta Rupiah tercatat tidak memiliki laporan keuangan. Hal ini memang dikarenakan pada cakupan ini didominasi oleh usaha/perusahaan mikro dan kecil. Rasio kepemilikan laporan keuangan pada kelompok usaha/perusahaan dengan omzet antara 300 juta Rupiah hingga 2,5 milyar Rupiah adalah 1:4 atau sekitar 25%. Sedangkan pada kelompok omzet 2,5 milyar hingga 50 milyar cenderung setara. Rasio perbandingannya hamper 1:1. Dengan kata lain, setengah dari kelompok usaha/perusahaan dengan omzet 2,5 milyar hingga 50 milyar memiliki laporan keuangan.

Sementara untuk usaha/perusahaan dengan omzet diatas 50 milyar Rupiah yang memiliki catatan/laporan keuangan lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki laporan keuangan.

Tabel II.8

**Banyaknya Usaha/Perusahaan dengan Ijin Khusus atau Tidak Berbadan Usaha dan Kepemilikan Laporan/Catatan Keuangan Menurut Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar**

Skala Usaha	Laporan/catatan keuangan		Jumlah
	Memiliki	Tidak Memiliki	
(1)	(2)	(3)	(4)
Omzet ≤ 300 Juta	4.659	74.917	79.576
300 Juta < Omzet ≤ 2,5 Milyar	2.225	8.845	11.070
2,5 Milyar < Omzet ≤ 50 Milyar	325	344	669
> 50 Milyar	28	5	33
	7.237	84.111	91.348

\* Hanya usaha/perusahaan dengan ijin khusus atau tanpa badan usaha

Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

## II.6 Karakteristik Usaha/Perusahaan Menurut Jaringan Usaha

Secara umum sebuah jaringan usaha dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis yang diantaranya meliputi :

1. Jaringan produksi : Meliputi koordinasi perencanaan dan pengembangan produksi, serta memperbaiki proses produksi. Selain itu dengan sumber daya yang tersedia jaringan ini akan membentuk produk baru, peralatan, sistem produksi, dan membuat produk unggul yang memiliki daya saing. Salah satu bentuk yang paling sering ditemui dari rangkaian ini antara lain adalah pabrik maupun lembaga riset dan penelitian.
2. Jaringan pemasaran : Jaringan ini membantu distribusi barang/jasa ke tangan konsumen serta bekerja sama untuk memperkuat posisi tawar-menawar dengan konsumen maupun memenangi persaingan pemasaran. Salah satu bentuk jaringan usaha ini misalnya gudang, kantor pemasaran serta unit pembantu lainnya.
3. Jaringan pelayanan : Meliputi pelatihan, informasi, teknologi, manajemen konsultasi atau jasa konsultasi ahli termasuk layanan pelanggan (*customer service*) termasuk di dalamnya aktivitas perkantoran seperti halnya kantor pusat maupun kantor cabang.
4. Jaringan bersama atau konsorsium yang meliputi kerjasama usaha dan BUMN. Kerjasama ini tidak hanya pada harga maupun pemasaran tetapi juga pada mutu pelayanan, sistem pembayaran, cara pengepakan, pengiriman barang, pembelian bersama, permodalan, pengadaan barang, dan bidang lainnya.

Usaha/perusahaan yang berdiri sendiri dengan satu orang pemilik dan satu manajemen dikenal dengan usaha tunggal dan biasanya tidak memiliki jaringan usaha. Bermodal relatif lebih kecil ,relatif lebih terbatasnya jenis dan jumlah produksi, memiliki tenaga kerja/buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana.

**Tabel II.9**  
**Banyaknya Usaha/Perusahaan Menurut Jaringan Usaha di Kota Denpasar**

Jaringan Usaha/Perusahaan	Jumlah	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
Tunggal	93.637	96,01
Kantor pusat	15	0,02
Cabang	2.405	2,47
Perwakilan	68	0,07
Pabrik (manufaktur)	11	0,01
Unit pembantu/ penunjang	13.90	1,43
	97.526	100,00

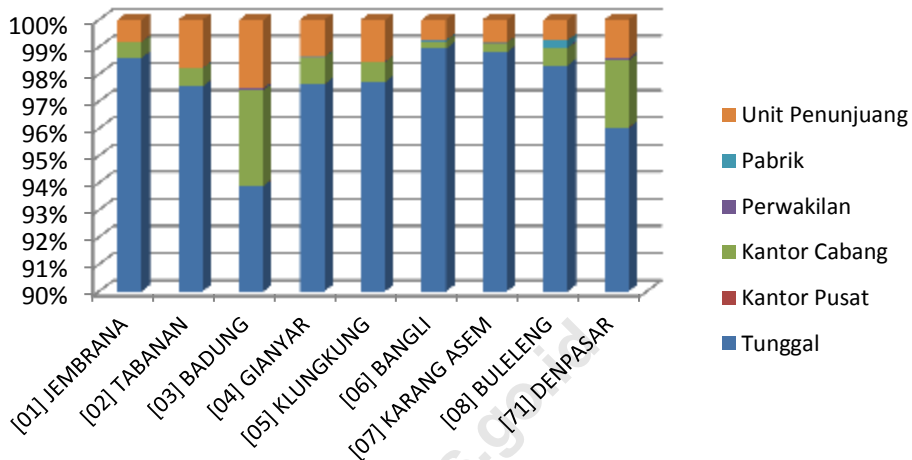
Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Sebagian besar usaha/perusahaan di Denpasar merupakan usaha tunggal dengan persentase 96% atau 93637 usaha/perusahaan. 4 persen dari total 97526 usaha/perusahaan yang bukan merupakan jaringan tunggal di Denpasar. Secara umum untuk Bali persentase usaha tunggal tercatat mencapai 97 persen.

Selain usaha tunggal, usaha yang merupakan kantor cabang dan unit penunjang juga merupakan jenis jaringan usaha yang lebih tinggi dari jenis jaringan usaha lainnya. Hal ini dikarenakan banyaknya kantor pusat yang berada di luar Bali sehingga kantor pusatnya tidak tercatat pada Listing SE2016 untuk wilayah Denpasar. Sedangkan pabrik (manufaktur) merupakan jaringan usaha terkecil dari keseluruhan jaringan usaha/perusahaan di Denpasar. Hanya tercatat 0.01% dari keseluruhan usaha/perusahaan yang tercatat pada Listing SE2016.

Grafik II.8

Persentase Jaringan Usaha Bukan Tunggal Terhadap Total Usaha/Perusahaan di Kabupaten/Kota Menurut Hasil Listing SE2016



Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Persentase yang mirip juga dapat dilihat dari sebaran kantor cabang. Lapangan usaha yang memiliki jumlah kantor cabang tertinggi di Bali adalah Perdagangan (G) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I). Persentase kantor cabang dari kedua lapangan usaha ini bahkan hampir tiga perlima dari keseluruhan kantor cabang. Dari 7,1 ribu kantor cabang di Bali, 2405 diantaranya berada di Denpasar.

Jumlah unit pembantu/penunjuang di Bali sebagian besar terdapat di Denpasar dan Badung. Dari 6,8 ribu unit penunjuang, 1390 diantaranya tercatat berada di Denpasar.

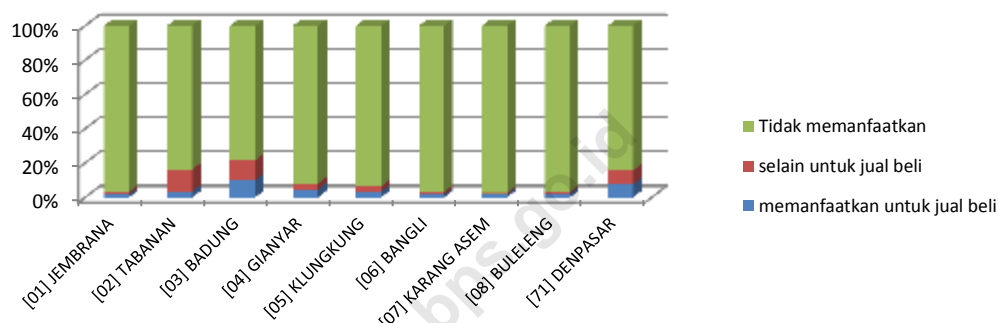
### II.7 Pemanfaatan Internet oleh Usaha/Perusahaan

Pemanfaatan internet dalam kegiatan usaha juga relatif masih rendah di wilayah Bali. Hanya sekitar 10,7 persen usaha/perusahaan di Bali yang memanfaatkan internet. Dari persentasenya 4,9 persen menggunakan internet untuk jual beli, sementara sisanya sebesar 5,8 persen menggunakan internet selain untuk jual beli (termasuk promosi). Dari sisi jumlah, tiga lapangan usaha yang paling banyak memanfaatkan internet adalah Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor (G), Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum (I) dan Industri Pengolahan (C).

Pemanfaatan internet untuk kegiatan ekonomi di Denpasar tidak lebih dari 20%, hanya tercatat 15,64 persen usaha/perusahaan yang memanfaatkannya. Dari persentase ini hanya setengah yang digunakan untuk jual beli. Persentase ini lebih rendah dari Badung yang mencapai 21% dan Tabanan 16,2%.

Grafik II.9

### Persentase Usaha/Perusahaan Berdasarkan Pemanfaatan Internet di Kabupaten/Kota Menurut Hasil Listing SE2016



Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Pada skala usaha/perusahaan mikro perbandingan penggunaan internet untuk selain jual beli lebih tinggi. Sedangkan menengah dan besar, penggunaan internet untuk jual beli dua kali lebih besar dibandingkan untuk selain jual beli.

Tabel II.10

### Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Pemanfaatan Media Internet dan Konsep Pengelompokan Skala Usaha di Kota Denpasar

Skala Usaha	Pemanfaatan Media Internet			Jumlah
	Ya, Untuk Jual Beli	Ya, Selain Untuk Jual Beli	Tidak Memanfaatkan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mikro	3.676	5.638	71.581	80.895
Kecil	1.592	1.424	9.098	12.114
Menengah	1.820	904	1.544	4.268
Besar	125	71	53	249
	7.213	8.037	82.276	97.526

Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016



**Tabel II.11**  
**Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Pemanfaatan Media Internet dan Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016 di Kota Denpasar**

Lapangan Usaha	Pemanfaatan Media Internet			Jumlah
	Ya, Untuk Jual Beli	Ya, Selain Untuk Jual Beli	Tidak Memanfaatkan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	27	25	318	370
C. Industri Pengolahan	788	1.026	12.655	14.469
F. Konstruksi	279	125	619	1.023
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	2.496	2.976	33.446	38.918
H. Pengangkutan dan pergudangan	334	303	988	1.625
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	795	1.558	21.582	23.935
J. Informasi Dan Komunikasi	319	216	1.008	1.543
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	388	280	646	1.314
L. Real Estat	71	100	1.545	1.716
M,N. Jasa Perusahaan	775	314	1.281	2.370
P. Pendidikan	297	265	827	1.389
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	79	162	781	1.022
R,S,U. Jasa Lainnya	565	687	6.580	7.832
	7.213	8.037	82.276	97.526

Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

## II.8 Penerapan Sistem Waralaba Oleh Usaha/Perusahaan

Selain penggunaan internet, keterangan yang baru pertama kali dikumpulkan dalam SE2016 adalah terkait dengan penerapan sistem waralaba. Waralaba adalah Suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan pemberi waralaba (*franchisor*) yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu.<sup>2</sup> Dalam waralaba dikenal dua istilah umum yaitu :

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Waralaba>

- Pemberi waralaba (*franchisor*) adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas usaha yang dimilikinya.
- Penerima waralaba (*franchisee*), adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan, atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba

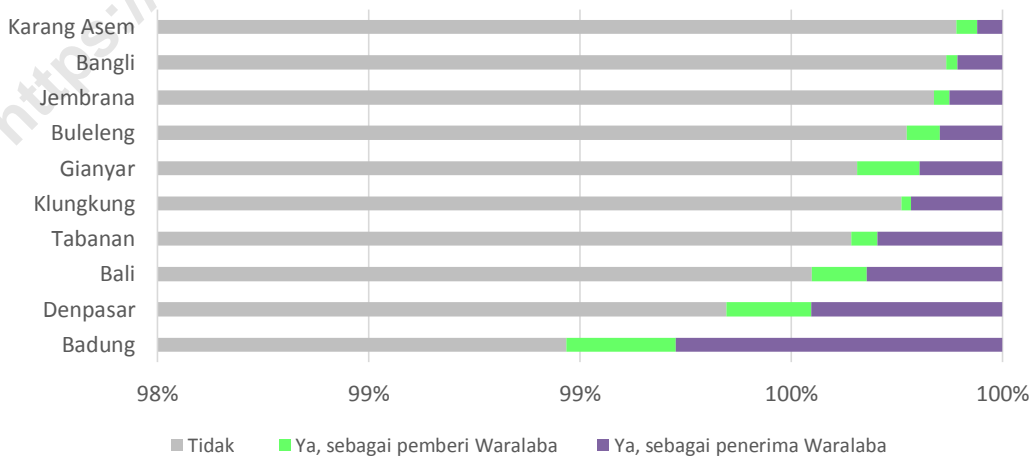
Sementara itu dilihat asalnya waralaba dibedakan menjadi dua yaitu :

- Waralaba luar negeri, cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah diterima diberbagai dunia, dan dirasakan lebih bergensi.
- Waralaba dalam negeri, juga menjadi salah satu pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup peranti awal dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba.

Waralaba sendiri tidak dapat diimplementasikan pada semua lapangan usaha. Secara umum waralaba akan efektif digunakan untuk lapangan usaha yang memiliki *demand* yang konsisten seperti halnya Perdagangan (G) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I).

Grafik II.10

Persentase Usaha/Perusahaan dengan Sistem Waralaba di Kabupaten/Kota Menurut Hasil Listing SE2016



Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Untuk Provinsi Bali, waralaba baru diterapkan sekitar setengah persen atau 2,2 ribu usaha/perusahaan. Badung dan Denpasar merupakan wilayah yang memiliki rasio waralaba tertinggi di Bali. Meskipun demikian perbedaan persentase usaha/perusahaan yang menerapkan waralaba antar kabupaten/kota tidaklah terlalu besar. Untuk waralaba ini, memang terlihat jelas di lapangan usaha Perdagangan (G) dan Akomodasi (I).

Rasio antara pemberi waralaba dan penerima waralaba sekitar 1 berbanding dua. Untuk lapangan usaha Perdagangan (G), hampir seimbang antara pemberi dan penerima waralaba. Berbeda dengan Penyedia akomodasi (I) yang memiliki rasio 1:4. Lapangan usaha Real estate(L) dan Industri pengolahan (C) tercatat ada usaha sebagai penerima waralaba meskipun tidak ada yang tercatat sebagai pemberi waralaba.

**Tabel II.12**  
**Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Penerapan Sistem Waralaba dan Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016 di Kota Denpasar**

Lapangan Usaha	Penerapan Sistem Waralaba			Jumlah
	Ya, Sebagai Pemberi Waralaba	Ya, Sebagai Penerima Waralaba	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0	0	370	70
C. Industri Pengolahan	0	2	14.467	4.469
F. Konstruksi	0	0	1023	1.023
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	113	187	38.618	38.918
H. Pengangkutan dan pergudangan	12	29	1.584	1.625
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	33	142	23.760	23.935
J. Informasi Dan Komunikasi	2	3	1.538	1.543
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0	0	1.314	1.314
L. Real Estate	0	3	1.713	1.716
M,N. Jasa Perusahaan	17	13	2.340	2.370
P. Pendidikan	7	31	1.351	1.389
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	2	3	1.017	1.022
R,S,U. Jasa Lainnya	10	28	7.794	7.832
	196	441	96.889	97.526

Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Sebagian besar waralaba baik itu di Denpasar maupun di Bali tercatat telah memiliki Surat Tanda Kepemilikan Waralaba (STPW). Persentase kepemilikan STPW di Denpasar mencapai lebih dari 70 persen sementara untuk Bali persentasenya tercatat 69 persen. Di antara kabupaten/kota di Bali persentase kepemilikan STPW tertinggi tercatat di Kabupaten Buleleng yang hampir mencapai 80 persen, sementara yang terendah di Jembrana yang hanya sekitar 51 persen.

Grafik II.11

**Banyaknya Usaha/Perusahaan yang Menerapkan Sistem Waralaba menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan STPW di Provinsi Bali**



Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Tabel II.13

**Banyaknya Usaha/Perusahaan yang Menerapkan Sistem Waralaba dan Kepemilikan STPW menurut Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016 di Kota Denpasar**

Lapangan Usaha (1)	Kepemilikan STPWD		Jumlah (4)
	Ya (2)	Tidak (3)	
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0	0	0
C. Industri Pengolahan	2	0	2
F. Konstruksi	0	0	0
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	215	85	300
H. Pengangkutan dan pergudangan	32	9	41
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	122	53	175
J. Informasi Dan Komunikasi	2	3	5
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0	0	0
L. Real Estat	2	1	3

M,N. Jasa Perusahaan	22	8	30
P. Pendidikan	30	8	38
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	4	1	5
R,S,U. Jasa Lainnya	22	16	38
	453	184	637

Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Dari sisi omzet sebagian besar omzet waralaba yang ada di Denpasar dibawah 300 juta Rupiah selama setahun. Hanya 4 penerima waralaba dan 5 pemberi waralaba yang omzetnya antara lebih dari 50 milyar Rupiah. Dari sisi omzet, penerima waralaba tercatat memiliki omzet yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberi waralaba.

**Tabel II.14**

**Banyaknya Usaha/Perusahaan menurut Penerapan Sistem Waralaba dan Konsep Pengelompokan Omzet di Kota Denpasar**

Lapangan Usaha	Penerapan Sistem Waralaba			Jumlah
	Ya, sebagai pemberi Waralaba	Ya, sebagai penerima Waralaba	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Omzet ≤ 300 Juta	83	268	81.390	81.741
300 Juta < Omzet ≤ 2,5 Milyar	63	105	13.334	13.502
2,5 Milyar < Omzet ≤ 50 Milyar	45	64	1.949	2.058
> 50 Milyar	5	4	216	225
Jumlah	196	441	96.889	97.526

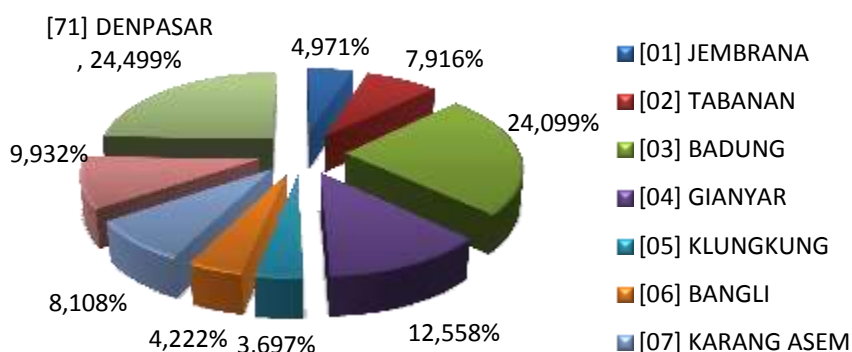
Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

**II.9 Penyerapan Tenaga kerja Oleh Usaha/Perusahaan**

Dari 1,34 juta tenaga kerja di Bali yang tercatat pada listing SE2016, tercatat 328 ribu orang atau 20,5 persen bekerja di Denpasar. Sama halnya dengan jumlah usaha/perusahaan, penggunaan tenaga kerja di Denpasar hampir sama dengan Badung. Dibandingkan dengan sebaran usaha/perusahaan kontribusi penggunaan tenaga kerja juga tercatat lebih tidak merata antar wilayahnya.

Grafik II.12

## Sebaran Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota Hasil Listing SE2016



Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Tabel II.15

## Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016 di Kota Denpasar

Lapangan Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Persentase
(1)	(2)	(3)
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	3.298	1,00
C. Industri Pengolahan	47.620	14,49
F. Konstruksi	12.021	3,66
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	102.609	31,23
H. Pengangkutan dan pergudangan	11.297	3,44
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	55.734	16,96
J. Informasi Dan Komunikasi	5.720	1,74
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	18.717	5,70
L. Real Estat	2.602	0,79
M,N. Jasa Perusahaan	14.640	4,46
P. Pendidikan	21.129	6,43
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	12.294	3,74
R,S,U. Jasa Lainnya	20.868	6,35
	328.549	100

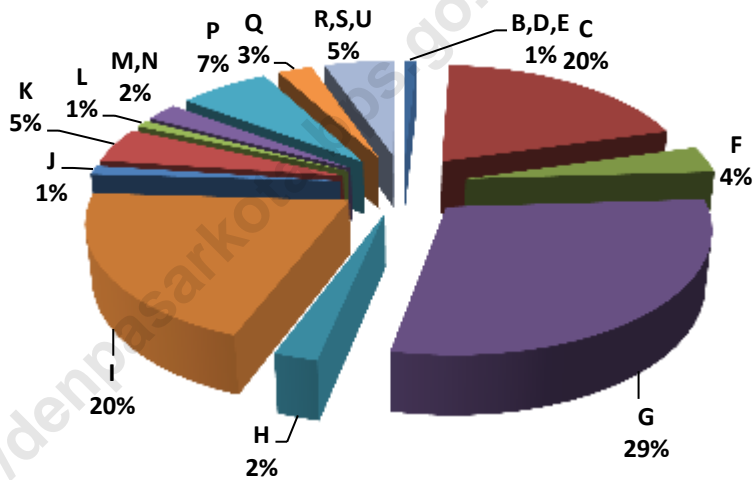
Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Di Denpasar, kelompok lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah Perdagangan (G) yang mencapai 102 ribu pekerja atau sekitar 31 persen dari angkatan kerja yang ada di Denpasar. Penyerapan tenaga kerja di Real estate dan Komunikasi adalah yang terendah.

Begitu halnya dengan di Bali secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja terbesar di kelompok usaha Perdagangan (G) dan Penyedia Komodasi (I).

Grafik II.13

Proporsi Penggunaan Tenaga Kerja pada Usaha/Perusahaan di Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha Hasil Listing SE2016



Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

### BAB III

#### ANALISIS POTENSI EKONOMI KOTA DENPASAR MENURUT PDRB (2010-2016), JUMLAH USAHA DAN TENAGA KERJA

Pada bagian ini akan diulas mengenai potensi ekonomi Kota Denpasar berdasarkan data makro yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah usaha/perusahaan dan jumlah tenaga kerja. Analisis yang digunakan dalam bab ini adalah :

- **LQ** (Sumber: Jumlah usaha dan tenaga kerja dari skala usaha UMB dan UMK hasil SE2016-L)
- **Shift Share** (Sumber: PDRB Harga Konstan tahun 2010 dan 2015 menurut kategori).

##### III.1 Analisis potensi ekonomi dengan metode *Location Quotient* (LQ)

Tujuan dari menggunakan metode ini adalah untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial dan keunggulan komparatif suatu wilayah. Interpretasi :

- Jika **LQ > 1**, berarti tingkat sektor tertentu pada Kota Denpasar lebih besar dari sektor yang sama dibandingkan dengan Provinsi Bali.
- Jika **LQ ≤ 1**, berarti sektor tertentu pada Kota Denpasar lebih kecil dari sektor yang sama dibandingkan dengan Provinsi Bali.
- Jika **LQ = 1**, berarti sektor tertentu pada Kota Denpasar sama dengan sektor tertentu pada Provinsi Bali.

Keterangan:

$S_{ij}$  : Jumlah usaha/tenaga kerja pada sektor i pada Kota Denpasar.

$S_j$  : Jumlah usaha/tenaga kerja pada Kota Denpasar.

$S_{in}$  : Jumlah usaha/tenaga kerja pada sektor i di Provinsi Bali.

$S_n$  : Jumlah usaha/tenaga kerja di Provinsi Bali

$$LQ = \frac{S_{ij}/S_j}{S_{in}/S_n}$$



Tabel III.1

## Perhitungan LQ jumlah usaha dan jumlah tenaga kerja Kota Denpasar

Lapangan Usaha	LQ Jumlah Usaha (Umk Dan Umb)	LQ Tenaga Kerja (Umk Dan Umb)
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	0.92	1.10
C. Industri Pengolahan	0.61	0.74
F. Konstruksi	0.99	1.02
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	0.98	1.07
H. Pengangkutan dan pergudangan	0.91	1.48
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	1.37	0.84
J. Informasi Dan Komunikasi	1.16	1.45
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	0.91	1.21
L. Real Estat	1.14	0.82
M,N. Jasa Perusahaan	1.46	1.81
P. Pendidikan	0.99	0.94
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	1.15	1.45
R,S,U. Jasa Lainnya	1.45	1.20

Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Berdasarkan perhitungan LQ jumlah usaha dan tenaga kerja, maka sektor usaha/perusahaan J) Informasi dan komunikasi; M,N) Jasa Perusahaan; Q) Aktivitas kesehatan dan sosial; dan R,S) Jasa lainnya merupakan sektor yang mampu memenuhi kebutuhan baik Kota Denpasar maupun luar daerah. Sektor tersebut dapat dijadikan sebagai sektor unggulan.

Sedangkan jika dilihat dari pertumbuhan jumlah usaha, maka sektor I) Akomodasi dan L) Real Estate juga merupakan sektor yang dapat dijadikan sektor unggulan.

### III.2 Analisis potensi ekonomi dengan metode SHIFT-SHARE

Analisis shift-share digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah,

yang dibandingkan dengan sektor yang sama atau pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional.

Analisis digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya.

Metode analisis shift share diawali dengan mengukur perubahan nilai tambah bruto atau PDRB suatu sektor-*i* di suatu region-*j* (*Dij*) dengan formulasi (Soepono,1993):

Dimana:

$$PN_{ij} = E_{ij} \cdot Ra$$

$$PP_{ij} = E_{ij} (R_i - Ra)$$

$$PPW_{ij} = E_{ij} (r_i - Ra)$$

$$r_i = (E_{ij,t} - E_{ij})/E_{ij}$$

$$R_i = (E_{in,t} - E_{in})/E_{in}$$

$$Ra = (E_{n,t} - E_n)/E_n$$

$$Dij = PN_{ij} + PP_{ij} + PPW_{ij}$$

Keterangan:

*Dij* : Perubahan PDRB sektor/subsektor-*i* di wilayah Kota Denpasar.

*PN* : Perubahan PDRB sektor/subsektor-*i* di wilayah Kota Denpasar yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

*PP* : Perubahan PDRB sektor/subsektor-*i* di wilayah Kota Denpasar yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor-*i* di Provinsi Bali.

*PPW* : Perubahan PDRB sektor/subsektor-*i* di wilayah Kota Denpasar yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor-*i* tersebut Wilayah Kota Denpasar.

*Eij* : PDRB sektor/subsektor-*i* di wilayah Kota Denpasar tahun awal analisis.

*Ein* : PDRB sektor/subsektor-*i* di Provinsi Bali tahun awal analisis.

*En* : PDRB total di Provinsi Bali tahun awal analisis.

*Eijt* : PDRB sektor/subsektor-*i* di wilayah Kota Denpasar tahun akhir analisis.

*Eint* : PDRB sektor/subsektor-*i* di Provinsi Bali tahun akhir analisis.

*Ent* : PDRB total di Provinsi Bali tahun akhir analisis

Tabel III.2

Perhitungan Shift-Share

	PNij = Eij . Ra	PPij = Eij (Ri - Ra)	PPWij = Eij (ri - Ra)	Dij = PNij+ PPij+ PPWij
B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	7,496	-2,748	-22,111	-17,363
	47,661	5,178	5,108	57,948
	37,433	-17,502	-15,936	3,995
C. Industri Pengolahan	803,175	-194,814	-289,576	318,784
F. Konstruksi	947,141	66,016	104,584	1,117,741
G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	988,798	-11,028	17,692	995,462
H. Pengangkutan dan pergudangan	340,043	-33,270	-28,291	278,482
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	2,446,574	-43,688	-229,757	2,173,130
J. Informasi Dan Komunikasi	535,343	85,349	78,893	699,585
K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	616,153	124,071	146,564	886,788
L. Real Estat	513,970	-87,544	-9,983	416,443
M,N. Jasa Perusahaan	211,739	-40,124	-33,770	137,845
P. Pendidikan	1,100,388	327,266	258,937	1,686,591
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	217,061	78,719	102,531	398,310
R,S,U. Jasa Lainnya	161,532	-11,159	-19,188	131,185

\*dalam juta rupiah

\* bernilai positif di tiap poin

\* bernilai tinggi dibanding sektor lain

Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Kolom PN menunjukkan sektor I) Akomodasi; P) Pendidikan; G) Perdagangan dan C) Industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Terutama sektor I) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan makan dan minum.

Perubahan PDRB sektor-i di Kota Denpasar yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor-i di Provinsi Bali (kolom PP) menunjukkan sektor K) Keuangan dan P) Pendidikan lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan sektor tersebut di Propinsi Bali secara keseluruhan. Sama halnya dengan kolom (PPW) yaitu Perubahan PDRB sektor-I di Kota Denpasar yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif

sektor-i di Kota Denpasar terlihat bahwa sektor P dan K juga bertumbuh lebih baik dibanding sektor lainnya. Selain itu, sektor F) konstruksi; J) Komunikasi; dan Q) Kesehatan dan kegiatan sosial tidak ada yang bernilai negatif, hal ini berarti ketiganya terus bertumbuh meskipun tidak dominan.

Dilihat dari keseluruhan, maka sektor yang pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya adalah I) Penyediaan akomodasi dan Penyediaan makan dan minum; serta P) Pendidikan. Begitu pula dengan sektor G) perdagangan; dan K) Keuangan.

### III.3 Hasil analisis potensi ekonomi Kota Denpasar dengan LQ dan Shift-Share

**Tabel III.3**  
Perhitungan dengan LQ dan Shift-share

	PN	PP	PPW	Dij	LQ jumlah usaha (UMK dan UMB)	LQ tenaga kerja (UMK dan UMB)	jumlah
B B,D,E. Pertambangan, Energi, Pengelolaan Air dan Limbah	1	0	0	0	0	1	2
C. Industri Pengolahan	1	0	0	1	0	0	2
<b>F. Konstruksi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>G. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
H. Pengangkutan dan pergudangan	1	0	0	1	0	1	3
I. Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	1	0	0	1	1	0	3
<b>J. Informasi Dan Komunikasi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>K. Aktivitas Keuangan Dan Asuransi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
L. Real Estat	1	0	0	1	1	0	3
<b>M,N. Jasa Perusahaan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>P. Pendidikan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>R,S,U. Jasa Lainnya</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Sumber : Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016

Penggunaan metode LQ dan Shift-Share menunjukkan bahwa sektor yg berkembang lebih baik dari sektor lainnya (sektor unggulan) adalah sektor J) Informasi dan Komunikasi; Q) Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial; F) Konstruksi; K) Aktivitas Keuangan; G) Perdagangan; M,N) Jasa Perusahaan; P) Pendidikan; dan R,S,U) Jasa Lainnya.

#### IV. 1 Serba-serbi Sensus Ekonomi 2016

- Tipe Pengumpulan Data : *Cross sectional*, yaitu data dikumpulkan pada waktu tertentu dan menggambarkan parameter pada saat itu serta digunakan untuk keterkaitan antar variabel
- Petugas Pengumpul Data : Staf BPS, KSK, Mitra
- Cakupan Responden : Perusahaan dan Rumahtangga usaha di luar lapangan usaha pertanian.
- Cakupan Wilayah : Seluruh wilayah di Indonesia
- Unit Statistik : Perusahaan dan Rumahtangga usaha di luar lapangan usaha pertanian.
- Unit Analisis : Perusahaan dan Rumahtangga usaha di luar lapangan usaha pertanian.
- Metode Pengumpulan Data : Wawancara langsung
- Instrumen yang Digunakan : Kuesioner, buku pedoman, dan peta wilayah

#### IV. 2 Konsep/ Definisi yang Digunakan :

- **Badan usaha:** Kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
- **Perseroan Terbatas (PT):** Perusahaan yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang.
- **Perseroan (PT Persero) :** Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- **Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) :** Perusahaan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- **Firma:** Persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba yang diperoleh dibagi bersama-sama dan rugi dari perusahaan ditanggung bersama pula.
- **Koperasi:** Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
- **Dana pensiun:** Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
- **Yayasan:** Sebuah badan usaha dengan kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan bukan untuk mencari keuntungan.
- **Ijin khusus** dari instansi terkait Perijinan yang diberikan oleh instansi pemerintah (sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota) pada usaha/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha. Ijin khusus sifatnya lebih spesifik, misal: ijin dari instansi Pemerintah Daerah setempat untuk usaha penggilingan padi.
- **Perwakilan perusahaan/lembaga asing** Bentuk badan usaha suatu perusahaan yang mengikuti nama bentuk badan usaha perusahaan yang membawahnya di luar wilayah Indonesia.
- **Tidak berbadan usaha:** Suatu usaha yang tidak memiliki badan usaha/ijin khusus. Termasuk dalam kelompok ini usaha-usaha perorangan.
- **Laporan/catatan keuangan** : Pencatatan secara teratur, rutin, dan sistematis terkait perubahan yang terjadi pada penghasilan usaha pada periode waktu tertentu. Dari pembukuan tersebut, dapat menyusun laporan keuangan, dalam bentuk laporan rugi laba dan neraca.
- **Kegiatan utama:** Kegiatan usaha yang mempunyai nilai produksi/pendapatan/penjualan paling besar.
- **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):** Klasifikasi dari unit usaha/perusahaan, yang mengacu pada jenis kegiatan usaha dan barang/jasa yang dihasilkan.

- **Usaha konstruksi perorangan** : Usaha konstruksi perorangan dengan sistem borongan dan aktif selama setahun yang lalu.
- **Usaha Penyediaan Akomodasi** : Usaha yang menyediakan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya, seperti asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.
- **Klasifikasi usaha akomodasi** : Standar usaha hotel yang dirumuskan pada kualifikasi usaha hotel dan atau penggolongan kelas usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hotel. Klasifikasi ini dibuktikan dengan sertifikat yang dimilikinya.
- **Hotel Bintang** : Usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran akomodasi yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
- **Hotel Melati** : Usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel non bintang yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.
- **Jasa akomodasi lainnya**: Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang tidak termasuk salah satu di atas, misalnya bungalow, cottage, dan lain-lain. Termasuk kelompok ini asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost.
- **Usaha/perusahaan Tunggal**: Usaha/perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh usaha/perusahaan yang bersangkutan. Usaha/Perusahaan tunggal disebut juga usaha/perusahaan tanpa cabang.
- **Usaha/perusahaan Kantor pusat**: Perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/unit pembantu di tempat lain yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan

dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantu/unit penunjang.

- **Usaha/perusahaan Cabang** : Kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menjalankan semua jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.
- **Perwakilan** : Kegiatan ekonomi yang dalam melakukan kegiatannya berdasarkan petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan dan kepanjangan tangan dari kegiatan ekonomi (perusahaan) yang secara struktural berada di atasnya/kantor pusat.
- **Pabrik (manufaktur)** : Tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan/proses produksi, yaitu merubah bahan dasar/baku menjadi barang jadi atau setengah jadi (dari barang yang kurang nilainya menjadi lebih bernilai).
- **Unit pembantu/ penunjang** : Kegiatan ekonomi yang dalam memproduksi barang/jasa terutama untuk keperluan kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya, baik kantor pusat, cabang, maupun perwakilan. Unit pembantu pada umumnya tidak mempunyai kewenangan sebagaimana layaknya perusahaan.
- **Pekerja** : Semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan usaha/perusahaan, termasuk pekerja outsourcing yang terlibat dalam proses produksi (yang dibayar langsung oleh perusahaan).
- **Pekerja/karyawan dibayar** : Semua pekerja yang biasanya bekerja pada usaha/perusahaan dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari usaha/perusahaan tersebut baik berupa uang maupun barang.
- **Pekerja tidak dibayar**: Pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya ikut aktif dalam mengelola kegiatan usaha/perusahaan, tetapi tidak mendapat upah/gaji.
- **Pekerja tidak tetap** : Pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji secara tidak tetap dan apabila diberhentikan biasanya tidak mendapat pesangon.
- **Pekerja kontrak** : Pekerja yang bekerja dengan perjanjian kontrak kerja dengan batas waktu tertentu.



- **Bulan Kerja** : Bulan dimana usaha tersebut melakukan kegiatan usaha walaupun hanya 1 hari.
- **Jaringan internet** : Sekumpulan komputer dalam jumlah yang besar yang saling berhubungan dalam suatu jaringan yang terhubung *internet protocol*, tidak hanya terbatas pada spek perangkat keras tetapi juga mencakup perangkat lunak, sehingga banyak pengguna (*user*) dapat menggunakan kunci sharing, misalnya saling memperoleh informasi, mengirimkan data berupa teks, pesan, grafis, maupun suara.
- **Waralaba (*franchise*)**: Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain (Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba).
- **Pemberi Waralaba (*franchisor*)** : Orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
- **Penerima Waralaba (*franchisee*)** : Orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba
- **Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)** : Bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Menteri.
- **Nilai produksi/ penjualan/ pendapatan selama 1 (satu) bulan**: Rata-rata nilai produksi/penjualan/pendapatan usaha/perusahaan sebulan selama tahun 2015 atau rata-rata nilai produksi/penjualan/pendapatan usaha/perusahaan sebulan selama tahun 2016 (bila usaha/perusahaan baru beroperasi tahun 2016).

### IV.3 Keluaran Utama Hasil Listing SE2016

1. Jumlah usaha/perusahaan menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha;
2. Jaringan usaha/perusahaan;
3. Jumlah tenaga kerja usaha/perusahaan;
4. Skala usaha/perusahaan menurut kategori tertentu;
5. Omzet usaha/perusahaan (Menurut Kategori);
6. Penggunaan Internet;
7. Penerapan sistem waralaba

<https://denpasarkota.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

- Bendavid-Val, A. 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners (4th ed.)*. New York: Praeger.
- Blakely, Edward J. 1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*, Sage Library of Social Research 168, Washington: Sage Publication.
- Budiharsono, Sugeng, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Dalum, B., K. Laursen and G. Villumsen. 1998. *Structural Change in OECD Export Specialization Patterns: De-specialization and 'stickiness*, International Review of Applied Economics 12: 447-467.
- Departemen Perindustrian. 2006. *Membangun Daya Saing Industri dengan Basis Kluster dan Kompetensi Inti Daerah*. Jakarta: Depperin.
- Hill, H. (Ed.). 1989. *Unity and Diversity: Regional Economic Development in Indonesia since 1970*. Singapore: Oxford University Press.
- Hill, Hal, Budy P. Resosudarmo dan Yogi Vidyattama. 2009. *Economic Geography of Indonesia: Location, Connectivity, and Resources. Reshaping Economic Geography in East Asia*. Washington: The World Bank.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi ke-4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia, Menuju Negara Industri Baru 2030*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kuncoro, Mudrajad. 2008. *Expectation on Government Policy to Strengthen Industry Competitiveness*. Published Proceeding Paper, Indonesian Debt Forum (IDF). Bank Indonesia.

- Laursen, K. 1998. *Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialization*, DRUID
- Ma'rif, Samsul, *Ekonomi Wilayah dan Kota, Ekonomika dalam Perencanaan Identifikasi Sektor Strategis*, Diklat Kuliah PWK UNDIP Semarang, 2002.
- Nawanir, Hanif (2003), *Studi Pengembangan Ekonomi dan Keruangan Kota Sawahlunto Pascatambang*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (2003)
- Warpani, Suwardjoko, *Analisis Kota dan Daerah*, ITB Bandung, 1984.
- Working Paper. No 98-30. *Danish Research Unit for Industrial Dynamics (DRUID)*.
- Widodo, Tri. 2009. Dynamics of Trade Specialization: Two Competing Econometric Models. JEL No. F10, F14, F17.
- Widodo, Tri. 2009. *Comparative Advantage: Theory, Empirical Measures, and Case Studies*. REBS Review of Economic and Business Studies, Issue April, 2009.
- Wörz, J. 2005. *Dynamic of Trade Specialization in Developed and Less Developed Countries*, *Emerging Markets Finance and Trade* 41(3):92-2

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

*Enlighten The Nation*



**Badan Pusat Statistik Kota Denpasar**

Jl. Mulawarman, No. 11, Denpasar 81111

Telp. (0361) 418770, Fax. (0361) 434326

Homepage: <http://denpasarkota.bps.go.id>

Email: [bps5171@bps.go.id](mailto:bps5171@bps.go.id)

